



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/05/DPRD/2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diperlukan komitmen di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 88A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 2 (dua) bulan setelah :
- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. Pensiun.
- KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- KETIGA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B, apabila :
- a. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. Pensiun.
- KEEMPAT : Copy tanda terima penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud diktum kesatu, wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara apabila dikirimkan langsung ke KPK kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur.
- KELIMA : Menetapkan Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur sebagai Koordinator LHKPN dan mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud diktum kesatu, agar segera menyampaikan LHKPN.

- KEENAM : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini berlaku, Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberlakukannya Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 4 Januari 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR




YADI MULYADI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/05/DPRD/2019

TANGGAL : 4 Januari 2019

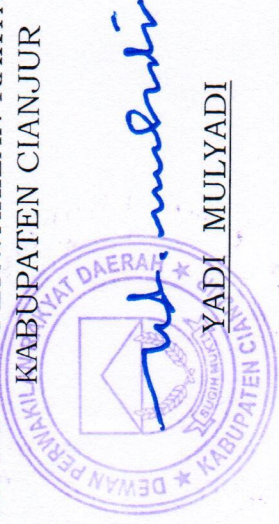
NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	ALAMAT DAN NOMOR TELEPON KANTOR	KET.
1	YADI MULYADI, SH., MH.	CIANJUR, 08-06-1973	KETUA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
2	DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	CIANJUR, 05-05-1980	WAKIL KETUA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
3	SUSILAWATI, SH.	CIANJUR, 02-10-1981	WAKIL KETUA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
4	ANDRI SURYADINATA, SE.	CIANJUR, 18-09-1980	WAKIL KETUA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
5	Dr. H. DENNY ADITYA D., SE., MAP.	JAKARTA, 14-07-1977	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
6	Hj. ZULFA INDRAMAWATI, SH., MH.Kes.	CIANJUR, 01-01-1960	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
7	Hj. LIKA NURHAYATI, S.IP.	CIANJUR, 13-02-1974	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
8	Hj. LILIS BOY	CIANJUR, 12-03-1958	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
9	YANTO MUSTARAM, SH.	CIANJUR, 16-10-1967	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
10	ASEP SETIAWAN, SH.	CIAMIS, 01-01-1970	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
11	Hj. ITA YUDHA JAYA SARI, SH.	CIANJUR, 25-10-1965	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
12	GEUGEU TITIN MARIANI, SH.	CIANJUR, 19-10-1974	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
13	H. ENDANG RENTEK	CIANJUR, 07-05-1953	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
14	H. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	CIANJUR, 02-06-1978	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
15	Drs. H. SAPTURO	CIANJUR, 03-10-1953	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
16	HENDRA GUNAWAN, ST.	CIANJUR, 14-08-1974	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
17	ASEP IWAN GUSNIARDI	CIANJUR, 15-03-1968	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	ALAMAT DAN NOMOR TELEPON KANTOR	KET.
18	Hj. NINA SITI AISYAH	BANDUNG, 05-01-1972	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
19	DEDIH SUGIANTO	CIANJUR, 01-07-1967	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
20	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	CIANJUR, 07-09-1970	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
21	DADANG SUTARMO, SH.	CIANJUR, 01-02-1970	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
22	YEDI RISWANDI, S.IP.	GARUT, 13-09-1965	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
23	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	CIANJUR, 16-12-1977	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
24	INDRA YULIANA MULYA, SE.	CIANJUR, 30-06-1977	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
25	CECEP BULDAN	CIANJUR, 25-05-1969	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
26	YUSUP EPENDI, SE.	CIANJUR, 11-08-1968	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
27	SAHLI SAIDI, SH.	MATARAM, 23-07-1972	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
28	YOYOY BADRU	CIANJUR, 18-08-1980	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
29	Drs. H. GUGUN GUNAWAN	CIANJUR, 04-11-1963	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
30	TAVIP DARMAWAN	CIANJUR, 02-03-1965	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
31	H. WILMAN SINGAWINATA	CIREBON, 16-11-1966	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
32	H. TEGUH AGUNG NM, S.Si.	CIANJUR, 10-11-1977	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
33	Hj. ISTINGANAH, SH.	BANYUMAS, 18-07-1968	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
34	H. DANI HAMDANI, SE.	CIANJUR, 09-05-1980	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
35	dtrh. BARUNA F. W.	SEMARANG, 14-02-1972	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
36	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	CIANJUR, 16-02-1982	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
37	H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	CIANJUR, 05-08-1974	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
38	DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	CIANJUR, 23-07-1979	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	ALAMAT DAN NOMOR TELEPON KANTOR	KET.
39	DEDE BADRI, S.Ag., M.MPd.	CIANJUR, 11-05-1975	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
40	ADE SOBARI, S.AP.	CIANJUR, 18-11-1975	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
41	SUKANDAR SUDIRHAP	CIANJUR, 05-05-1970	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
42	TIKA LATIFAH, S.Sos.	BANDUNG, 15-10-1977	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
43	ENCE DENI NURYADI	CIANJUR, 29-07-1975	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
44	H. CECEP S. ZUHRI, SH., MH.	CIANJUR, 15-08-1962	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
45	ANNEU PERMATASARI, S.IP.	CIANJUR, 23-07-1989	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
46	Drs. H. ACENG ROMDON	CIANJUR, 12-09-1969	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
47	H. MUHAMMAD TOHA, S.Ag., M.Pd.	CIANJUR, 22-10-1975	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
48	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	CIANJUR, 05-02-1970	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
49	GERRI ARDIWIMARTA, ST.	CIANJUR, 20-10-1976	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	
50	ASEP SOPYAN	CIANJUR, 12-10-1971	ANGGOTA DPRD	JLN. K.H. ABDULLAH BIN NUH TELP. 0263-272165	

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 4 Januari 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI